

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN VERBAL ATAU FISIK PADA PETUGAS RUMAH SAKIT OLEH PASIEN ATAU KELUARGA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Nazwa Sabina¹, Dwi Noerjoedianto^{2*}, Arnild Augina Mekarisce³, Annisa Putri S⁴

¹⁻⁴Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi

Email Korespondensi: dwi_noerjoedianto@unja.ac.id

Disubmit: 18 Desember 2025

Diterima: 27 Januari 2026

Diterbitkan: 01 Februari 2026

Doi: <https://doi.org/10.33024/mnj.v8i2.24090>

ABSTRACT

Violence against healthcare workers in hospitals has become a global concern. This violence often occurs in service areas, both verbal and physical, and can impact the physical and mental health of healthcare workers. Nurdin Hamzah Regional Hospital, as a referral hospital in Tanjung Jabung Timur District, does not yet have an effective policy to address violence against healthcare workers. This study aims to evaluate the implementation of the violence handling policy for healthcare workers at this hospital. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with 10 informants, including the hospital director, specialist doctors, members of the violence handling committee, nurses, administrative staff, and security officers. Other data collection techniques include observation and documentation. Data analysis was conducted using thematic analysis with the assistance of NVivo software. The study found that although the violence handling policy has been implemented, there are gaps in communication between hospital units, especially in units with a lower frequency of violence incidents. Additionally, the reporting system for violence is still suboptimal due to psychological barriers from healthcare workers who are concerned about worsening relationships with patients' families. However, the presence of the healthcare protection committee and a clear reporting system provides support for the implementation of the policy. The implementation of the violence handling policy for healthcare workers at Nurdin Hamzah Regional Hospital is underway, but improvements are needed in communication between units, the reporting system, and increased psychological support for victims. It is recommended that the hospital enhance training and policy socialization and improve the reporting system to better protect healthcare workers from violence.

Keywords: *Policy, Violence Against Healthcare Workers, Hospital, Reporting System.*

ABSTRAK

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit semakin menjadi perhatian global. Insiden kekerasan verbal maupun fisik sering kali terjadi di ruang pelayanan, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental tenaga kesehatan. RSUD Nurdin Hamzah, sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belum memiliki kebijakan yang efektif untuk menangani kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang terdiri dari direktur rumah sakit, dokter spesialis, anggota komite penanganan kekerasan, perawat, petugas administrasi, dan satpam. Teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penanganan kekerasan sudah diterapkan, terdapat kesenjangan dalam komunikasi antar unit rumah sakit, terutama di unit dengan frekuensi insiden kekerasan yang lebih rendah. Selain itu, sistem pelaporan kekerasan masih tidak optimal karena hambatan psikologis dari tenaga kesehatan yang khawatir akan memperburuk hubungan dengan keluarga pasien. Meskipun demikian, adanya komite perlindungan tenaga kesehatan dan sistem pelaporan yang jelas memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap tenaga kesehatan di RSUD Nurdin Hamzah sudah berjalan, namun perlu ada perbaikan dalam hal komunikasi antar unit, sistem pelaporan, dan peningkatan dukungan psikologis bagi korban. Disarankan agar rumah sakit meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kebijakan serta memperbaiki sistem pelaporan untuk melindungi tenaga kesehatan dari kekerasan.

Kata Kunci: Kebijakan, Kekerasan Terhadap Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit, Sistem Pelaporan.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan, baik yang berupa kekerasan verbal maupun fisik, telah menjadi masalah serius yang mendapat perhatian global (Mento, 2020). Tenaga kesehatan, terutama di rumah sakit, sering kali menjadi sasaran kekerasan oleh pasien atau keluarga pasien. Dalam konteks rumah sakit, kekerasan ini dapat berupa ancaman verbal, pelecehan, intimidasi, atau bahkan serangan fisik yang berpotensi merugikan baik kesejahteraan fisik maupun psikologis tenaga kesehatan. Berdasarkan data dari Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO), delapan dari sepuluh tenaga kesehatan pernah mengalami kekerasan dalam bentuk verbal atau fisik selama menjalankan tugas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan merupakan masalah yang meluas dan semakin mendesak untuk ditangani.

Di Indonesia, masalah kekerasan terhadap tenaga kesehatan semakin mendapat perhatian. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi sering kali melibatkan pasien atau keluarga pasien yang merasa tidak puas dengan pelayanan

yang diberikan. Kekerasan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti komunikasi yang buruk antara tenaga kesehatan dan pasien, ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan, serta kondisi emosional pasien atau keluarga yang tidak stabil (Nugrahanti, 2024).

RSUD Nurdin Hamzah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu rumah sakit yang menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Meskipun rumah sakit ini telah memiliki kebijakan perlindungan tenaga kesehatan, namun pelaksanaan dan efektivitasnya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di rumah sakit ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam melindungi tenaga kesehatan dari kekerasan, baik verbal maupun fisik.

Faktor penyebab kekerasan terhadap tenaga kesehatan sangat beragam, mulai dari ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan, kurangnya komunikasi yang efektif, hingga kondisi emosional pasien atau keluarga yang tidak stabil (Zhang, 2024). Meskipun ada kebijakan perlindungan tenaga kesehatan, banyak rumah sakit yang belum memiliki prosedur yang jelas untuk menangani insiden kekerasan. Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak manajemen rumah sakit sering menjadi kendala dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lapangan (Bravo, 2024).

Di berbagai rumah sakit, pelaksanaan kebijakan perlindungan tenaga kesehatan masih belum efektif akibat prosedur penanganan yang belum jelas serta dukungan psikologis yang masih terbatas¹¹. Sebagai rumah sakit rujukan di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, RSUD Nurdin Hamzah juga menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan tenaga kesehatan, karena beberapa insiden kekerasan dilaporkan masih terjadi di lingkungan rumah sakit ini¹². Kondisi ini memperkuat urgensi evaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kesehatan.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kesehatan di rumah sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima pasien.

TINJAUAN PUSTAKA

Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap tenaga kesehatan diidentifikasi, seperti ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan, kurangnya komunikasi efektif, serta ketegangan emosional yang timbul akibat kondisi pasien atau keluarga pasien yang tidak stabil. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan tenaga kesehatan sudah ada, implementasinya belum optimal di banyak rumah sakit. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan, tidak adanya prosedur yang jelas untuk menangani kekerasan, serta kurangnya dukungan dari pihak manajemen rumah sakit dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi (Zhang, 2024).

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan memberikan dampak yang serius terhadap kesejahteraan psikologis maupun kinerja mereka. Insiden kekerasan dapat menimbulkan gangguan tidur, peningkatan stres, hingga masalah

psikologis lainnya yang menghambat tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Namun, penanganan kekerasan di fasilitas kesehatan masih belum berjalan secara sistematis, karena beberapa kasus sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak institusi. Hambatan pelaporan juga masih tinggi karena ketakutan tenaga kesehatan akan memperburuk hubungan dengan keluarga pasien serta kurangnya pendampingan dari pihak manajemen ketika terjadi insiden kekerasan (Maryani, 2025).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan kekerasan verbal atau fisik terhadap tenaga kesehatan di RSUD Nurdin Hamzah (Brunero, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, tantangan, dan efektivitas kebijakan yang diterapkan di rumah sakit dalam menghadapi insiden kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Nurdin Hamzah, termasuk perawat, dokter spesialis, petugas administrasi, dan satpam. Sampel penelitian terdiri dari 10 informan yang dipilih secara purposive, yang terdiri dari pihak manajemen rumah sakit, dokter spesialis, anggota komite penanganan kekerasan, perawat, petugas administrasi, dan satpam. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang representatif terkait implementasi kebijakan di berbagai level rumah sakit.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang

terpilih, observasi langsung terhadap kondisi di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada di RSUD Nurdin Hamzah. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan kekerasan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan (Laksono, 2024). Sampel terdiri dari 10 informan, meliputi pihak manajemen rumah sakit, dokter spesialis, anggota komite penanganan kekerasan, perawat, petugas administrasi, serta satpam sebagai representasi pelaksanaan kebijakan pada berbagai unit pelayanan.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data lapangan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber data berupa perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumen kebijakan agar temuan lebih kredibel.

HASIL PENELITIAN

Analisis implementasi kebijakan perlindungan tenaga kesehatan terhadap kekerasan di Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari 10 informan yang mewakili berbagai unit dan posisi strategis di rumah sakit, analisis tematik dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 15 untuk menghasilkan 6 tema utama yang

menggambarkan implementasi kebijakan tersebut.

Komunikasi kebijakan di RSUD Nurdin Hamzah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk rapat manajemen, briefing pagi, WA resmi, dan poster edukasi. Namun, meskipun komunikasi kebijakan berjalan baik di unit IGD, ditemukan adanya kesenjangan pemahaman antara unit IGD yang lebih disiplin

dan unit lain seperti poliklinik yang cenderung kurang memahami kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem komunikasi sudah berjalan, perlu adanya penyesuaian pendekatan yang lebih terfokus dan sesuai dengan karakteristik masing-masing unit untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan efektif di seluruh rumah sakit.

Tabel 1. Analisis Komunikasi Kebijakan Antar Unit

Unit	Pemahaman Kebijakan	Metode Sosialisasi	Hasil Sosialisasi
IGD	Tinggi	Rapat manajemen, briefing pagi	Penerapan SOP lebih disiplin
Poliklinik	Rendah	WA resmi, briefing pagi	Penerapan SOP kurang merata
Rawat Inap	Sedang	WA resmi, briefing pagi	Penerapan SOP kurang optimal

RSUD Nurdin Hamzah telah menyediakan fasilitas dasar yang mendukung perlindungan tenaga kesehatan, seperti CCTV, jalur evakuasi, dan petugas keamanan. Namun, fasilitas keselamatan modern seperti tombol darurat belum terpasang merata di semua unit, yang disebabkan oleh

keterbatasan anggaran. Di sisi lain, pelatihan komunikasi efektif dan de-eskalasi dilakukan setidaknya satu kali setahun untuk tenaga kesehatan. Namun, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas fisik dan teknologi keamanan di rumah sakit untuk menunjang efektivitas kebijakan.

Tabel 2. Ketersediaan Fasilitas Keamanan di Rumah Sakit

Fasilitas	Tersedia	Keterangan
CCTV	Ya	Terpasang di hampir seluruh titik rumah sakit
Jalur Evakuasi	Ya	Tersedia di setiap unit
Petugas Keamanan	Ya	Standby 24 jam di beberapa titik
Tombol Darurat	Tidak	Belum terpasang merata di semua unit

Meskipun rumah sakit memiliki dua kanal pelaporan insiden (formulir manual dan aplikasi digital internal), hambatan psikologis masih menjadi masalah utama. Sebagian tenaga kesehatan merasa khawatir jika melaporkan insiden kekerasan, terutama karena takut memperburuk hubungan dengan

keluarga pasien. Komite Perlindungan Tenaga Kesehatan telah berusaha mendampingi pelapor, tetapi persepsi risiko sosial tetap menjadi penghalang besar dalam pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan dukungan psikologis dan sistem pendampingan bagi tenaga kesehatan yang melaporkan insiden

kekerasan sangat diperlukan. Implementasi SOP terkait penanganan kekerasan sudah disusun dan dapat diakses oleh semua unit. Namun, implementasi SOP belum merata antar unit. Unit IGD cenderung lebih disiplin dalam menerapkan SOP karena intensitas kasus kekerasan yang lebih tinggi, sementara unit lain seperti poliklinik dan rawat inap cenderung kurang patuh. Ini menunjukkan bahwa intensitas kekerasan di setiap unit berpengaruh terhadap kedisiplinan penerapan SOP.

Struktur organisasi di RSUD Nurdin Hamzah sudah mendukung implementasi kebijakan dengan tanggung jawab utama berada pada Direktur, dibantu oleh Kepala Bidang Pelayanan, Keperawatan, dan Bagian Umum. Komite Perlindungan Tenaga Kesehatan juga memainkan peran penting dalam verifikasi

laporan dan investigasi insiden kekerasan. Koordinasi antar unit menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini. Kolaborasi yang lebih erat antara manajemen, tenaga medis, dan keamanan perlu ditingkatkan. Sebagian besar informan menilai bahwa kebijakan perlindungan tenaga kesehatan sudah efektif, terbukti dengan meningkatnya kesadaran tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden kekerasan dan lebih berhati-hati dalam menghadapi pasien. Namun, beberapa informan juga menyarankan bahwa penguatan fasilitas fisik, seperti pemasangan tombol darurat dan pelatihan yang lebih intensif, masih diperlukan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kesehatan dan memastikan keberlanjutan efektivitas kebijakan.

Tabel 3. Evaluasi Implementasi SOP dan Kebutuhan Penguatan

Aspek	Status Implementasi	Kebutuhan Penguatan
Penerapan SOP di IGD	Tinggi	Peningkatan fasilitas keamanan
Penerapan SOP di Poliklinik	Sedang	Peningkatan pemahaman dan pelatihan
Pelatihan SDM	Cukup	Pelatihan lebih sering dan intensif

Tabel ini merangkum hasil temuan terkait sejauh mana SOP diterapkan dengan baik di berbagai unit, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat atau

kebutuhan untuk peningkatan lebih lanjut dalam implementasi kebijakan perlindungan tenaga kesehatan.

PEMBAHASAN

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan di RSUD Nurdin Hamzah berperan penting dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Sosialisasi kebijakan dilakukan

melalui berbagai saluran, seperti rapat manajemen, briefing pagi, dan WhatsApp resmi. Komite Perlindungan Tenaga Kesehatan juga melakukan sosialisasi langsung di unit berisiko tinggi, seperti IGD,

dengan diskusi interaktif. Namun, terdapat kesenjangan pemahaman antara unit-unit, dengan IGD lebih disiplin dalam menerapkan kebijakan dibandingkan dengan unit lain seperti poliklinik. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih terfokus untuk memastikan penerapan kebijakan secara merata di seluruh rumah sakit.

Aspek sumber daya memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penanganan kekerasan di RSUD Nurdin Hamzah. Rumah sakit telah menyediakan fasilitas dasar keamanan seperti CCTV yang terpasang di hampir seluruh area rumah sakit, jalur evakuasi yang jelas, dan petugas keamanan yang siap siaga 24 jam. Selain itu, tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan komunikasi efektif dan teknik de-eskalasi minimal sekali setahun. Namun, meskipun fasilitas dasar sudah tersedia, terdapat keterbatasan pada fasilitas keselamatan modern, seperti tombol darurat yang belum terpasang merata di seluruh unit rumah sakit akibat kendala anggaran. Oleh karena itu, meskipun sumber daya dasar sudah memadai, peningkatan teknologi keselamatan ini menjadi prioritas untuk mendukung kebijakan penanganan kekerasan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kesehatan (Hamzah, 2023).

Aspek disposisi pada penerapan kebijakan penanganan kekerasan di RSUD Nurdin Hamzah sangat mempengaruhi keberhasilannya, terutama terkait sikap dan kesiapan tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit dalam menangani insiden kekerasan. Rumah sakit menyediakan dua saluran pelaporan, yaitu formulir manual dan aplikasi digital internal.

Namun, hambatan psikologis masih muncul, dengan tenaga kesehatan khawatir akan memperburuk hubungan dengan keluarga pasien setelah melaporkan kekerasan. Komite Perlindungan Tenaga Kesehatan mendampingi pelapor untuk memastikan keamanan, namun persepsi sosial dan ketakutan akan konflik menjadi hambatan utama. Meskipun sistem pelaporan berjalan dengan baik, penguatan disposisi tenaga kesehatan untuk melapor sangat diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif (Dunn, 2023).

Aspek struktur birokrasi pada penerapan kebijakan penanganan kekerasan di RSUD Nurdin Hamzah menunjukkan bahwa meskipun rumah sakit memiliki struktur organisasi yang jelas, koordinasi antar unit menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Struktur organisasi melibatkan berbagai unit yang saling berkoordinasi, dengan tanggung jawab utama berada di tangan Direktur dan didukung oleh Kepala Bidang Pelayanan, Keperawatan, dan Bagian Umum. Komite Perlindungan Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk verifikasi laporan dan investigasi awal. Meskipun SOP telah diterapkan, terdapat ketidaksamaan dalam penerapannya antar unit, dengan unit IGD lebih disiplin dibandingkan unit lain seperti poliklinik. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar unit dan evaluasi rutin terhadap penerapan SOP diperlukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif di seluruh rumah sakit (Bravo, 2024).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan tenaga

kesehatan terhadap kekerasan di RSUD Nurdin Hamzah sudah diterapkan dengan baik, masih ada kesenjangan dalam implementasi yang perlu diperbaiki. Perbaikan terutama diperlukan pada aspek komunikasi kebijakan, penguatan sarana fisik, pelatihan yang lebih intensif, serta dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan. Ke depannya, peningkatan koordinasi antar unit, penambahan fasilitas keselamatan, dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi SOP akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi tenaga kesehatan di rumah sakit ini.

Evaluasi berkala terhadap kapasitas SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitas, juga sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan kekerasan dapat diterapkan secara efektif di seluruh unit rumah sakit, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi tenaga Kesehatan. Dengan adanya anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk kebijakan ini, RSUD Nurdin Hamzah dapat memperkuat kapasitasnya dalam menangani kekerasan terhadap tenaga kesehatan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara keseluruhan, meskipun mekanisme pelaporan di RSUD Nurdin Hamzah sudah berjalan dengan baik, faktor psikologis yang menghalangi tenaga kesehatan untuk melapor tetap menjadi kendala utama. Penguatan sistem dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan serta jaminan keamanan pelapor menjadi kunci untuk memastikan bahwa pelaporan insiden kekerasan dapat dilakukan dengan efektif dan kebijakan penanganan kekerasan dapat

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Hasanah, U., & Utami, I. T. (2023). Penerapan Strategi Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Cara Verbal Pada Pasien Risiko Perilaku Kekerasan Di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. *Jurnal Cendikia Muda*, 3(2), 218-225.
- Baba, A. I. M., Bondi, A. P. J., Manda, B. K., Indrawan, R., & Sitorus, N. Y. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Kekerasan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 3(4).
- Bravo Queipo De Llano B, Sainz T, Díez Sáez C, Barrios Miras E, Bueno Barriocanal M, Cózar Olmo Ja, Et Al. (2024). Violence As A Health Problem. *An Pediatr (Engl Ed)*. Mar 1;100(3):202-11.
- Brunero S, Tetik E, Donnelly N, Lamont S. (2025). Understanding The Experience Of Workplace Violence In Hospitals As Documented By Nursing Staff: Using The Read Approach. *Workplace Health Saf*. Mar 1;73(3):139-49.
- Dunn W. (2023). Journal Of Humanities And Social Studies Public Policy Oleh William Dunn: Analysis And Implementation. *Journal Of Humanities And Social Studies*.;1(1).
- Firmansyah, E. (2025). Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat Terhadap Perawat Yang

- Mengalami Tindak Kekerasan Oleh Pasien. *Nalar Yuridis*, 1(1), 29-36.
- Haiti, D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Mengalami Penyerangan Fisik Atau Mental Dalam Melakukan Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4415-4426.
- Hamzah Rn. (2023). Keputusan Direktur Rsud Nurdin Hamzah Nomor: 400.7.3.10/08/Tu/Rsudnh/2023 Tentang Panduan Penanganan Kekerasan Terhadap Staf. Muara Sabak;
- Makhruzah, S., Putri, V. S., & Yanti, R. D. (2021). Pengaruh Penerapan Strategi Pelaksanaan Perilaku Kekerasan Terhadap Tanda Gejala Klien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 10(1), 39-46.
- Maryani Am, Widjaja G. (2025); Peran Perhimpunan Profesi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Di Indonesia The Role Of Professional Associations In Legal Protection For Medical Personnel In Indonesia. *Sibatik Journal* | Volume [Internet]. 4(4).
- Nugrahanti Jh, (2024). Kesehatan H, Noor Mt, Zamroni M. Kekerasan Verbal Dari Pasien Terhadap Tenaga Kesehatan: Bagaimana Menyikapinya? *Jurnal Kertha Semaya* [Internet]. 12(11):3047-81. Available From: <https://doi.org/10.24843/Ks.2024.V12.I11.P24>
- Nur, S. M., & Ismahmudi, R. (2016). Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Sikap Perawat Dalam Penatalaksanaan Pasien Perilaku Kekerasan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda.
- Rahmadani, N. D. A. (2022). *Promosi Kesehatan Pencegahan Verbal Abuse Atau Kekerasan Verbal Di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Setyadi, L., Widiyono, W., & Herawati, V. D. (2022). *Hubungan Pelaksanaan Restrain Dengan Tingkat Kecemasan Perawat Dalam Penanganan Pasien Gangguan Jiwa Di Rsjd Surakarta* (Doctoral Dissertation, Universitas Sahid Surakarta).
- Tombakan, M., & Aminah, S. (2023). *Perencanaan Pulang Dan Peran Serta Keluarga Pasien Perilaku Kekerasan Pasca Perawatan Rumah Sakit*. Penerbit Nem.
- Zhang B, Wong A, Constantino Re, Hui V. (2024) The Association Between Psychological Distress, Abusive Experiences, And Help-Seeking Among People With Intimate Partner Violence. *Bmc Public Health*. Dec 1;24(1).
- Zhang B, Wong A, Constantino Re, Hui V. (2024). The Association Between Psychological Distress, Abusive Experiences, And Help-Seeking Among People With Intimate Partner Violence. *Bmc Public Health*. Dec 1;24(1).